

PENGARUH BADAN PENGAWASAN DAERAH DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

(Survey pada Aparat Pengawas Fungsional Daerah dan Pejabat
Dinas Provinsi Jawa Barat)

Asep Effendi R

Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP, Bandung

Abstract

This research aims to study and learn about the local functional supervision, internal control, the application of good governance, as well as explanations tested empirically the effect of regional and functional oversight of internal control of the system good governance. This study is conducted by survey. The population in the study area is functional regulatory authorities (Bawasda), and all officials of the 21 Department of West Java Province. Selected sample of 213 officers are spread proportionally in 21 offices. Data collected by using interviews and questionnaires. Furthermore, the data were analyzed using descriptive and path analysis.

The results showed that: Monitoring functional area (Bawasda) and internal control (internal control) positive effect on good governance.

Keywords: *Bawasda, Internal Control, Good Governance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mengkaji tentang pengawasan fungsional daerah, pengendalian intern (*internal control*), penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta penjelasan yang teruji secara empiris mengenai pengaruh Pengawasan fungsional daerah dan pengendalian intern (*internal control*) terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Populasi dalam penelitian adalah aparat pengawas fungsional daerah (Bawasda), dan seluruh pejabat pada 21 Dinas Propinsi Jawa Barat. Sampel terpilih adalah sebanyak 213 pejabat yang tersebar secara proporsional pada 21 dinas. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner. Selanjutnya data dianalisis deskriptif dan menggunakan analisis jalur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pengawasan fungsional daerah (Bawasda) dan pengendalian intern (*internal control*) berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata kunci : *Bawasda, Internal Control, Good Governance*

1.1. Pendahuluan

Sejak digulirkannya Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 32 dan 33 tahun 2004, tentang otonomi daerah, khususnya di bidang keuangan daerah, pemerintah daerah mendapat kewenangan secara mandiri dalam mengelola keuangannya. Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 tersebut berisi tentang otonomi daerah, sehingga undang-undang tersebut sering disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat terlaksananya otonomi daerah tersebut perlu dibuat peraturan - peraturan lanjutan dari undang-undang tersebut.

Keberadaan Bawasda sebagai internal auditor ditiap Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) diatur dalam Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan dan Undang-Undang No. 15 tahun 2007 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas melakukan Audit Keuangan, Audit Operasional dan Audit Kinerja. Bawasda sebagai pemeriksa intern memiliki fungsi yang independen dan obyektif, serta dapat memberikan *assurance* dan konsultasi (*consulting*) kepada pimpinan Pemerintah Daerah. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan nilai tambah (*value added*) dan memperbaiki operasional Pemerintah Daerah. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa Auditor Internal, membantu organisasi dalam pencapaian tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan interdisiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki keefektifan manajemen risiko, pengendalian, dan proses

tatakelola (*governance*) organisasi yang baik (Sawyer et. al : 2003). Untuk selanjutnya keberadaan Bawasda pada Pemerintah daerah diatur berdasarkan masing-masing Peraturan daerah (Perda) pada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sesuai dengan otonomi daerah, Pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) berhak menentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan/Dinas di lingkungannya masing-masing. Hal ini mengakibatkan organisasi Bawasda untuk masing-masing daerah tidak sama/seragam seperti halnya bernama Itwilda.

Agar hasil audit memberikan dampak sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka aparat pengawasan fungsional daerah selaku auditor yang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan kinerja operasional pemerintah daerah, harus memiliki profesionalitas yaitu persyaratan kemampuan / keahlian, independensi, dan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (BPK RI, 1995 : 17-25)

Pengendalian intern didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga dimensi berikut : (a). efektif dan efisien; (b). Laporan pertanggungjawaban; dan (c). Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (IAI : 2004). Untuk memperoleh keyakinan memadai mengenai pencapaian ketiga dimensi tujuan pengendalian intern tersebut, pimpinan memerlukan jasa auditor internal (*internal auditor*) dalam hal ini Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) sebagai lembaga pengawasan fungsional bertanggungjawab kepada pemimpin puncak Pemerintah Daerah (Agus Riyanto, 2005).

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan

penelitian yang dituangkan dalam judul penelitian **"Pengaruh Pengawasan Fungsional Daerah dan Pengendalian Intern (*internal control*) terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.**

Berdasarkan latar belakang penelitian , secara lebih spesifik dan lebih rinci dapat dirumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

Seberapa besar pengaruh pengawasan fungsional daerah (Bawasda) terhadap pengendalian intern (*internal control*) terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), baik secara simultan maupun secara parsial.

1.2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *basic/fundamental research* (Sekaran ; 2003). *Basic research* memiliki tujuan utama untuk menghasilkan lebih banyak pengetahuan dan pemahaman terhadap fenomena yang menarik dan membangun teori – teori berdasarkan hasil penelitian.

Selanjutnya menurut Sekaran (2003 : 118) disain riset adalah rencana dari struktur riset yang mengarahkan proses dan hasil riset sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien dan efektif. Disain riset tersebut terdiri dari : (1) tujuan studi ; (2) tipe penelitian ; (3) luas intervensi penelitian ; (4) *study setting* ; (5) unit analisis ; dan (6) rentang waktu.

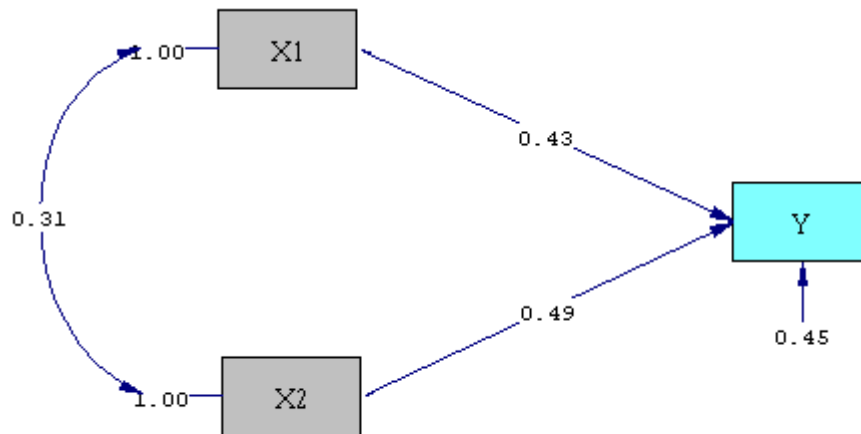
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 21 Dinas Provinsi Jawa Barat dengan responden sebanyak 251 yang terdiri dari aparat pengawas fungsional daerah dan pejabat dinas.

1.3. Hasil dan Pembahasan

1.3.1. Pengujian Hipotesis

a. Secara Simultan

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan dengan menggunakan LISREL 8.50 diperoleh estimasi model dan diagram jalur sebagai berikut



Chi-Square=0.00, df=0, P-value=1.00000, RMSEA=0.000

Gambar 4.2

Hubungan Struktural Pengawasan Fungsional Daerah (Bawasda) (X₁) dan Pengendalian Intern (X₂) terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Y)

Pengujian secara simultan ditujukan untuk mengetahui sejauh mana

kecocokan model dengan data. Pengujian secara simultan ini juga biasa disebut dengan uji kebaikan/kecocokan (*Goodness of Fit/GOF*) dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Model cocok/fit dengan data

H_A : Model tidak cocok/fit dengan data

Taraf signifikansi (α) = 5%

Dengan menggunakan LISREL diperoleh output berikut :

Tabel 1
Ringkasan Hasil Uji Kesesuaian Model (GOF)
Pengaruh Pengawasan Fungsional Daerah (X_1) dan Pengendalian Intern (X_2)
terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Y)

Ukuran GOF	Estimasi	Batas Penerimaan Model Fit	Hasil Uji
Chi-Square (df = 0)	0.000	Nilai Chi-Square table	Model <i>fit</i> sempurna
Nilai p	1.000	> 0.05	Model <i>fit</i> sempurna
RMSEA	0.000	< 0.08	Model <i>fit</i> sempurna

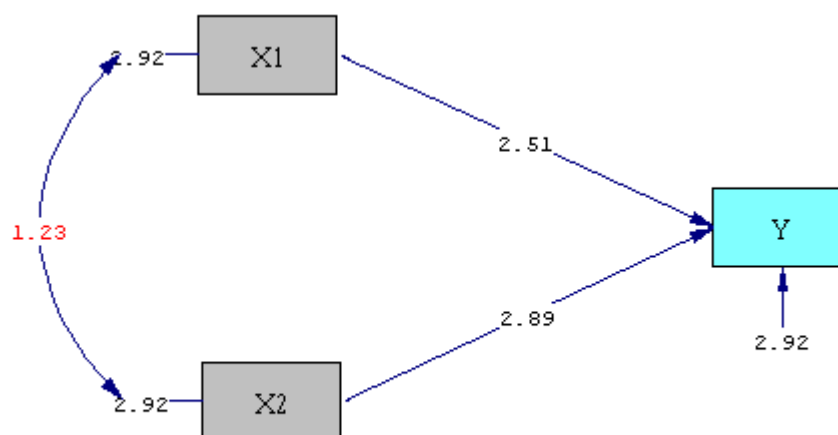
b. Secara Parsial

Untuk menguji hipotesis secara parsial, dilakukan melalui hipotesis statistik sebagai berikut :

- 1) H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan fungsional daerah (Bawasda) terhadap tata kelola pemerintahan yang baik
- H_A : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan fungsional

daerah (Bawasda) terhadap tata kelola pemerintahan yang baik

- 2) H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengendalian intern terhadap tata kelola pemerintahan yang baik
- H_A : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengendalian intern terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.



Chi-Square=0.00, df=0, P-value=1.00000, RMSEA=0.000

Gambar 1
Diagram Jalur T-Value Pengaruh Pengawasan Fungsional Daerah (X₁) dan Pengendalian Intern (X₂) terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Y)

Berdasarkan gambar 1 di atas diketahui hasil pengujian secara keseluruhan model, tidak ada nilai t berwarna merah, yang menunjukkan koefisien bobot

faktor yang bersangkutan signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam ringkasan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Hasil Komputasi Statistik SEM Model Struktural
Pengaruh Pengawasan Fungsional Daerah (X₁) dan Pengendalian Intern (X₂) terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Y)

Model Pengukuran		Koefisien Bobot Faktor (Standardized)	Standard Error (SE)	Nilai T hitung	Nilai t tabel	Hasil Uji ($\alpha = 0,05$)	R ²
Variabel Endogen	Variabel Eksogen						
Y	X ₁	0.43	0.17	2.51	2.01	S	0.55
	X ₂	0.49	0.17	2.89		S	

Pada model pengaruh pengawasan fungsional daerah (Bawasda) dan pengendalian intern terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, diketahui dari masing-masing hasil pengujian di atas bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan fungsional daerah (Bawasda) terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, dan juga antara pengendalian intern terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dengan

koefisien determinasi (R²) sebesar 0.55 atau 55%. Artinya, pengawasan fungsional daerah (Bawasda) dan pengendalian intern mampu menerangkan variabilitas dari tata kelola pemerintahan yang baik sebesar 55% dan sisanya sebesar 45% disebabkan oleh faktor lain di luar model.

1.3.2. Sumbangan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung antara Variabel X_1 dan X_2 terhadap Y

Setelah dilakukan pengujian hipotesis pada masing-masing model persamaan struktural dalam analisis jalur maka langkah selanjutnya adalah menghitung

besarnya sumbangan pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sumbangan pengaruh langsung dan tidak langsung dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen pada setiap substruktur adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Tabel Sumbangan Pengaruh Pengawasan Fungsional Daerah (X_1) dan Pengendalian Intern (X_2) terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Y)

Pengaruh	Jalur	Formulasi Rumus	Perhitungan	Besarnya Pengaruh
Variabel X_1				
Langsung	$Y-X_1-Y$	ρ_{yx1}^2	0.43×0.43	0,19
Melalui X_2	$Y-X_1-X_2-Y$	$\rho_{yx1} \cdot r_{x1x2} \cdot \rho_{yx2}$	$0.43 \times 0.31 \times 0.49$	0,06
Pengaruh Total X_1				0.25
Variabel X_2				
Langsung	$Y-X_2-Y$	ρ_{yx2}^2	0.49×0.49	0.24
Melalui X_1	$Y-X_2-X_1-Y$	$\rho_{yx2} \cdot r_{x2x1} \cdot \rho_{yx1}$	$0.49 \times 0.31 \times 0.43$	0.06
Pengaruh Total X_2				0.30
Pengaruh Total Variabel X_1 dan X_2				0.55
Pengaruh Variabel Lain				0.45

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengaruh langsung Pengawasan Fungsional Daerah (Bawasda) (X_1) terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (Y) sebesar 0.19 atau 19%, pengaruh tidak langsung pengawasan fungsional daerah (Bawasda) (X_1) melalui pengendalian intern (X_2) terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (Y) sebesar 0.06 atau 6%. Sehingga total pengaruh pengawasan fungsional daerah (Bawasda) (X_1) terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (Y) sebesar 0.25 atau 25%.

Sedangkan pengaruh langsung pengendalian intern (X_2) terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (Y) sebesar 0.24 atau 24%, pengaruh tidak langsung pengendalian intern (X_2) melalui pengawasan fungsional daerah (Bawasda) (X_1) terhadap tata kelola pemerintahan yang Baik (Y) sebesar 0.06 atau 6%. Sehingga total pengaruh pengendalian intern (X_2) terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (Y) sebesar 0.30 atau 30%.

2. Kesimpulan dan Saran

2.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Terdapat pengaruh positif pengawasan fungsional daerah dan pengendalian intern (*internal control*) terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). baik secara parsial maupun simultan.

2.2. Saran

Penelitian mengenai hubungan pengawasan fungsional daerah (Bawasda), pengendalian intern (*internal control*) , tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan kinerja dinas, dalam penelitian berikutnya perlu diperluas dengan memasukkan dan mengkaji lebih dalam variabel : (1) integritas dan objektivitas ; (2) manajemen dinas ;(3) komitmen pimpinan puncak;(4) budaya organisasi dan (d) penegakan peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Bachrudin, Harapan L. Tobing, 2003, Analisis Data untuk Penelitian Survei dengan Menggunakan Lisrel 8, FMIPA, Unpad Bandung.
- Age Johnsen, Penti Meklin, Lasse Oulasvirta, Jarmo Vakkuri, 2001, *Performance auditing in local Government : an exploratory study of perceived efficiency municipal value for money auditing in Finland and Norway*.
- Agoes, Sukrisno, 2004, Auditing oleh Kantor Akuntan Publik, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta
- Arens, Alvin A. Randal J. Elder Mark s Beasley, 2005, *Auditing And Assurance Service An Integrated Approach*, 9 th Edition, By Perason Education Inc, Upper Saddle River, New Jersey.
- Arja Sadjiarto (2000), *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan , Vol 2 No.2 November 2000 : 138-150.
- Azhar Susanto, La Midjan, 2003, Sistem Informasi Akuntansi, edisi 8, Linggajaya Bandung
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Norma Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern Instansi Pemerintahan. Surat Edaran Kepala BPKP Nomor 797/K/1995 tanggal 24 Desember 1995.
- Bambang Riyanto LS, Dwi Kusumawati, 2005, *Corporate Governance dan Kinerja : Analisis Pengaruh Compliance Reporting dan Struktur Dewan terhadap Kinerja*. Penelitian di Bursa Efek Jakarta.
- Benh, Bruce K, Joseph V, Carcello, Dana R Hermanson dan Roger H. Hermanson, 1997, *The Determination of audit. Client Satisfaction Among Clients of Big 6 Firms*, Accounting Horison, Vol 11, No.1
- Belay, Zeleke, 2007, *A study of effective Implementation of Internal Audit Functional to Promote Good Governance in the Public Sector*.
- Boyton William C, Kell, Walter G, 2001, *Modern Auditing*, Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc, New York
- Coram Paul, Calin Ferguson and Robyn Moroney, 2004, *Internal Audit, Alternative Internal Audit*

- Structur, and Level misappropriation of Assets Fraud.*
- Daniri, Mas, Ahmad., *Good Corporate Governance – Konsep dan Pencapaiannya dalam Konteks Indonesia*, Jakarta 2006
- Deddy Kusmayadi, 2006, Pengaruh Audit Operasional terhadap Implementasi Strategi serta dampaknya pada Kinerja Perusahaan, Survei pada Manufaktur Aneka Industri Go Public di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Trikonomika Bandung*.
- Deddy S Koesmana , Humbul Kristiawan & Ahmad Rizki, 2007, Peran Auditor Internal dalam Mencegah dan Medeteksi terjadinya Fraud menurut Standar Profesi, *Economic Business & Accounting Review*, Volume II No. 1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Donaldson. Lex, Davis James H , 2001, *Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Covernance and Shareholders Return*. *Australian Journal of Management* , Vol 16 iss 1.
- Eddy Mulyadi Soepardi, 2007, Upaya Pencegahan Fraud dalam mengelola Keuangan Negara, *Economic Business & Accounting Review*, Volume II No. 1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Elthan Dan, Thomas W. Lin dan Mark S . Young, 1996, *Benchmarking and Management ; A Framework for Research*, *Journal Management and Accounting Research*, Vol.9
- F Douglas, Parwit, 2006, *Internal Audit Function Characteristic and Earning Management*.
- Gongmeng Cheng, Michael Firth, Ning Gao, and Oliver Rui, 2005, *Do Ownership Structure and Givernance Mechanisms have an effect on Corporate Fraud in China's Listed Firms*.
- Harun Al-Rasyid, 1998, Teknik Penarikan Sampel dan Penyusunan Skala, tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung
- .Hadibroto, H.S, 1993, Peranan Fungsi Pengawasan dalam Manajemen, Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BUMN dan BUMD di Medan.
- Herman Soewardi, 2000, Roda Berputar Dunia Bergulir, Kognisi Baru tentang Timbul Tenggelamnya Sivilisasi, Bakti Madiri, Bandung.
- Hiro Tugiman, 2000, Pengaruh Peran Auditor Internal serta Faktor-Faktor Pendukung terhadap Upaya Peningkatan Pengendalian Internal dan Kinerja Perusahaan, Disertasi pada Universitas Padjadjaran Bandung.
- Indra Bastian , 2007, *Audit Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Iman Bastari, 2004, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan Daerah.
- Kieso, Donald E, dan Jerry J. Weygandt, 2000, *Intermediate Accounting*, 9 Edition, New York : John Wiley and Sons.
- Konrath, Laweey F, 2002, *Auditing Concepts and Aplications, A Risk-Analysis Approach*, 5 Edition, West Publishing Company.
- Komisi Pemberantasan Korupsi 2006, Memahami Untuk Membasmi : Buku Panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara RI, 1999, *Pedoman Penyusunan Pelaporan*

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara RI, 2000, Akuntabilitas dan *Good Governance*, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mohammad Nur Sodik, 2002, Implementasi *good corporate governance* di perusahaan publik di Indonesia.
- Ni Gusti Ayu Ginarni, 2004, Studi Kemungkinan Penggunaan Government Scorecard dalam Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Propinsi Bali. Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah Volume 1, Edisi kedua 2004. Program Pasca Sarjana STPDN Depdagri Republik Indonesia.
- Revrison Baswir, 2000, Akuntansi Pemerintahan Indonesia, BPFE Yogyakarta.
- Rosenbloom, David, 2005, *Public Administration*, Sixth Edition, McGraw Hill
- Sawyer B, Dittenhofer A. Mortimer, 2003, *Internal Auditing. 5th Edition, The Institute of Internal Auditors, Florida*.
- Sedarmayanti, 2007, *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Sitepu, Nirwana SK, 1994, Analisis Jalur (*Path Analysis*), Unit Statistika Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
- Steven M Glover, Marry and Ellis, 2006, *Internal Audit Sourcing arrangement and the External Auditor Reliance Decision*.
- Susian Arleen Herawaty, 2007, Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance, dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan.
- Sugiyono, 2004, Metode Penelitian Bisnis, Penerbit Cv.Alfabeta, Bandung.
- Syahrudin Rasul, 2003, Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
- Theodorus M Tuanakotta, 2007, Pengungkapan Fraud di Lembaga Negara, *Economic Business & Accounting Review*, Volume II No. 1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- The Institute of Internal Auditors, 1997, Statement on Internal Auditing Standard No. 16. Journal The Institute of Internal Auditors, Vol LIV: IV.
- Tim Research & Development FEUI, 2007, Penelitian tentang Persepsi Mahasiswa mengenai Fraud, *Economic Business & Accounting Review*, Volume II No. 1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2000, "Manajemen Pemerintahan Baru", Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Uma Sekaran, 2000, *Research Methods for Business, A Skill-Building Approach*, John Wilson, Inc, United States of America.
- Whittington O. Ray & Pany Kurt, 2004, *Principles of Auditing and Other Assurance Service*, Thirteenth

Edition, Mc Graw – Hill
Combapies Inc.

Yuyun Wirasasmita, 2004, Penggunaan
Analisis Jalur dalam Penulisan
Tesis dan Desertasi, Fakultas
Ekonomi Universitas Padjadjaran,
Bandung.